

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bentuk kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama yang terjalin antara berbagai pihak atau aktor yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk mencapai hasil tertentu. Dalam konteks Kolaboratif dalam penanganan prostitusi di eks Payo Sigadung Kota Jambi melibatkan berbagai pihak terkait meliputi pemerintah Kota Jambi melalui Satpol PP, Kepolisian, Dinas Sosial Kota Jambi dan instansi terkait lainnya. Kemudian terdapat keterlibatan dari lembaga swadaya masyarakat yaitu Yayasan Kanti Sehati yang berfokus pada pemberian dukungan sosial dan pendampingan terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Jambi. Selanjutnya ditemukan bahwasannya pelibatan masyarakat cenderung sangat sedikit dan tidak adanya pelibatan privat sektor, Sehingga *Collaborative Governance* dalam penanganan prostitusi di eks Payo Sigadung ini tidak dapat terjalin karena pelibatan masyarakatnya yang sedikit dan tidak adanya pelibatan privat sektor dalam pelaksanaannya. Meskipun upaya yang telah dilakukan mencakup penutupan lokalisasi, program rehabilitasi, dan pemulangan eks PSK ke daerah asal, yang terbukti mengurangi praktik prostitusi. Namun, tantangan masih ada, seperti pergeseran aktivitas ke lokasi tersembunyi. Untuk keberlanjutan program, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan partisipasi serta komunikasi dengan masyarakat dan perlunya pelibatan dari pihak swasta .

Kemudian langkah perbaikan dalam penanganan prostitusi di eks Payo Sigadung, Kota Jambi, harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan

unsur-unsur terkait. Upaya ini meliputi peningkatan kerja sama yang lebih formal melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperjelas peran setiap pihak dalam upaya pemberantasan prostitusi dan rehabilitasi sosial mantan pekerja seks. Di samping melakukan penertiban dan penegakan hukum, perlu adanya program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta pendampingan psikososial, guna memberikan alternatif pekerjaan yang lebih layak bagi mereka yang terlibat. Penting juga untuk memperketat pengawasan pasca penutupan lokalisasi agar praktik prostitusi tidak beralih ke tempat-tempat tersembunyi. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan prostitusi dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran dan rekomendasi yang peneliti berikan adalah dalam penanganan prostitusi di eks Payo Sigadung, Kota Jambi, adalah perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh aspek pemangku kepentingan. Pertama, diperlukan peningkatan peran serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi terbuka yang dapat menampung aspirasi dan keluhan mereka, sehingga mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan dukungan terhadap program yang ada dan diperlukannya pelibatan pihak swasta untuk mendorong *Collaborative Governance*. Kedua, pemerintah

harus memperkuat kolaborasi departemen terkait melalui penyusunan MoU untuk memperjelas tanggung jawab dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam melaksanakan program rehabilitasi yang mencakup pelatihan keterampilan, akses ke layanan kesehatan, dan dukungan psikososial bagi mantan pekerja seks. Ketiga, tindak lanjut pengawasan terhadap mantan pekerja seks dan operasi pengamanan perlu dilakukan secara kontinu dan strategis agar tidak terjadi peralihan praktik prostitusi ke lokasi yang lebih sulit dikendalikan. Selain itu, penting pula untuk memfasilitasi penciptaan peluang usaha yang lebih baik bagi individu yang terdampak, sejalan dengan program penguatan ekonomi berbasis masyarakat.